

**ANALISIS KELEMBAGAAN DAN KINERJA LEMBAGA PENYULUHAN
PERKEBUNAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**ANALYSIS OF INSTITUTIONAL AND PERFORMANCE OF
PLANTATION EXTENTION INSTITUTION IN ROKAN HILIR
REGENCY**

Dwi Risky Nugroho¹, Roza Yulida², Kausar²

Agribusiness Department, Agriculture Faculty, University of Riau

Address: Bina Widya, Pekanbaru, Riau

nugrohorisky25@gmail.com/085376030979

ABSTRACT

The aims of this study are to: (1) Describe the institutional of plantation extension in Rokan Hilir; (2) analyze the performance of plantation extension services in Rokan Hilir based on extension workers and farmers perception. This study was conducted in Rokan Hilir, the reason for taking this research is because Rokan Hilir is one of the regency that do not have a special institution to deal with extension activities. The method used to determine the sample in this research was purposive sampling, census, and Yaname Taro formula. Descriptive analysis is used to answer the first question and Likert Scale's Summated Rating (SLR) analysis was used to answer the second aim. The results showed: (1); The field of extension is a field that is responsible for extension activities that have 8 plantation extension, the members who work in plantation offices are not appropriate with their background , while for the program areas of extension is not running well. (2) the perception of the extension workers performance extension is in high category as can be seen from the responsiveness, responsibility, accountability and quality of service. Meanwhile, according to farmers' perception, the extension workers performance is in the low category that can be seen from indicators of responsiveness, responsibility, accountability and quality of service.

Keywords: Institutional, performance, extension institution

1) Mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

2) Dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau

PENDAHULUAN

Memasuki abad 21 kita dapat melihat bagaimana kondisi pertanian negara kita ini. Sektor pertanian Indonesia dikatakan belum siap untuk memasuki abad 21, dimana banyak memiliki peluang, tantangan sekaligus hambatan diantaranya permasalahan yang dihadapi adalah : lahan, infrastruktur, sarana produksi, regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia selain itu masalah klasik yang sering terjadi adalah masalah permodalan, kemudian tantangan yang akan dihadapi yakni : (1) pemenuhan pangan masyarakat, bahan baku industri dan energi; (2) perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam; (3) kondisi perekonomian global; (4) peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi; (5) distribusi dan pemasaran produk pertanian (Renstra Kementan, 2015-2019).

Kelembagaan penyuluhan merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian. Berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor.37/OT.140/M/3/2005 yang meminta agar Pemerintah Daerah membentuk suatu kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Keberadaan dan fungsinya kelembagaan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini juga diperjelas dalam pasal 8 ayat 2 bab V Undang- Undang No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang isinya meminta agar kelembagaan penyuluhan pemerintahan yang ada pada tingkat

kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan yang ada di Provinsi Riau sudah berjalan sebagai mana mestinya dimana kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau sudah banyak yang mengadopsi Undang- Undang No 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K) .

Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang belum memiliki badan khusus yang menangani kegiatan penyuluhan, dimana kegiatan penyuluhannya baik itu perkebunan maupun pertanian masih bergantung pada dinas-dinas yang berkaitan, hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 16 tahun 2006, yang menyatakan bahwa kelembagaan penyuluh di tingkat Kabupaten/Kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluh. Berbeda dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau.

Adanya perubahan pranata sosial kelembagaan di tingkat kabupaten/kota ini mendorong perlu dilakukan penelitian dengan judul “Anlisis kelembagaan dan Kinerja Lembaga Penyuluhan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir”. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kelembagaan penyuluhan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir dan menilai kinerja lembaga penyuluhan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan presepsi dari penyuluh perkebunan dan petani kelapa sawit.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-November 2016, dengan tahap kegiatan yang dimulai dengan survei lapangan, penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data dan penyusunan laporan akhir penelitian. Alasan pengambilan penelitian di Kabupaten Rokan Hilir karena Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang tidak memiliki Lembaga penyuluh yang spesifik menaungi kegiatan penyuluhan Perkebunan dimana mereka masih bergantung pada Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir.

Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, dimana teknik ini digunakan untuk menentukan sampel yang berada pada Dinas perkebunan, teknik ini digunakan untuk menentukan kriteria kecamatan yang akan mewakili satu kabupaten dalam penelitian ini dengan kriteria: (1) kecamatan dengan jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah (Kecamatan Bangko); (2) kecamatan dengan jarak cukup jauh dengan ibukota kabupaten adalah (Kecamatan Rimba Melintang); dan (3) yang terakhir adalah kecamatan dengan jarak sangat jauh dengan ibukota kabupaten adalah (Kecamatan Pujud). Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel penyuluh dilakukan dengan metode sensus, hal ini dikarenakan dari tiga kecamatan hanya terdapat tiga penyuluh perkebunan, dan yang terakhir teknik penentuan sampel

untuk petani dilakukan dengan menggunakan rumus *Taro yaname*, Hal ini mengacu pada pendapat Ridwan dan Engkos (2011:49), bahwa “ teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro yaname atau Slovin apabila populasi sudah diketahui”.

Tabel 1. Total responden.

No	Responden	Jumlah
1	Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir	5
2	Penyuluh perkebunan	3
3	Petani kelapa sawit	100
Total		108

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas dinas perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, penyuluh perkebunan dan petani perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Sedangkan data primer yang dikumpulkan meliputi tugas dan fungsi dari bidang penyuluhan, kinerja dinas perkebunan dalam menangani kegiatan penyuluhan berdasarkan indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan kualitas layanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi ataupun kelmbagaan yang terkait seperti Biro Pusat Statistik Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir. Serta data-data terkait dengan potensi daerah. Adapun panduan untuk menjawab tujuan pertama dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Panduan wawancara

Tujuan	Key person	Panduan
Menganalisis kelembagaan penyuluhan perkebunan	1. Kepala dinas. 2. Kepala bidang penyuluhan beserta seksi-seksinya	Struktur lembaga. Tugas dan fungsi

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir maka digunakan empat dari lima indikator yang telah dikemukakan oleh dwiyanto (2006:47), sebagai indikasi untuk menilai kinerja yaitu responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan kualitas layanan. Keempat indikator ini dipilih dengan alasan bahwa

Tabel 3. Indikator penilaian kinerja lembaga penyuluhan Perkebunan

No	Indikator	Sub indikator
1	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none">• Mengenal kebutuhan Petani• Menentukan Prioritas Pelayanan
2	Responsibilitas	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Program Penyuluhan yang Sesuai• Misi dan Tujuan Penyuluhan Pertanian• Program pembangunan pertanian
3	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Lembaga Penyuluhan
4	Kualitas Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan, informasi dan penyuluhan• Kecepatan dalam memberikan pelayanan• Ketepatan materi dan teknik pelayanan informasi

Sumber: dwiyanto, 2006

Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif, yaitu suatu metode atau cara menganalisa dan menguraikan data-data penelitian yang ada, dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan yang disajikan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis “Kelembagaan Penyuluhan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir”.

indikator ini dirasa telah cukup mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik. Mengacu dari beberapa pendapat tokoh yang melakukan pengkajian terhadap kinerja suatu organisasi publik atau organisasi pemerintahan indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan produktifitas ini yang banyak disebutkan untuk menilai keinerja organisasi (Budhiarsa, 2009).

Indikator dan sub indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja lembaga penyuluhan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan persepsi penyuluh dan petani disajikan pada Tabel 3 berikut:

Untuk menjawab tujuan kedua menggunakan analisis *Skala Likert's*. Menurut Sugiyono (2012:93), *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial. Dimana setiap jawaban akan diberi sekala seperti pada Tabel 4 dibawah ini.

belakangan pendidikan sosial dan politik, dan bidang penyuluhan yang berlatar belakangan Sarjana Pendidikan.

Menurut Sutermeister dalam Machmud (2012:213), kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor “motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisi-kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistik”. Latar belakang pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang karyawan maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Agar kinerja karyawan baik maka diperlukan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir No 17 tahun 2002 yang membahas tentang pembentukan organisasi dan tata kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir. Dinas perkebunan merupakan unsur pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir dibidang perkebunan. Berdasarkan peraturan daerah No 13 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir.

Cakupan bahasan untuk menjawab tujuan pertama dalam penelitian ini hanya membahas tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi bidang penyuluhan beserta kepala seksinya.

Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan juga mempunyai fungsi diantaranya

adalah melaksanakan pembinaan terhadap kelompok tani, pembuatan poster-poster dan brosur-brosur yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan dan menyebarkan informasi bidang perkebunan melalui TV, radio surat kabar atau majalah-majalah.

Bidang penyuluhan adalah salah satu bidang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penyuluhan perkebunan dan hasil yang didapat bahwa jumlah penyuluh sebanyak 8 orang yang terdiri dari 7 penyuluh PNS dan 1 penyuluh honor, dari angka tersebut menunjukkan bahwa satu orang penyuluh memiliki cakupan wilayah kerja dua sampai 3 kecamatan. Hal ini dikarenakan penyuluhan di bidang perkebunan hanya sebagai PPL yang bersifat struktural yang bertugas atas perintah dinas perkebunan. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya tenaga penyuluh dibidang perkebunan masih sangat kurang sehingga wajar saja kalau pengetahuan petani masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan kebijakan untuk dapat memberikan penyuluhan khusus pada bidang perkebunan sehingga petani dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk berusahatani kelapa sawit dan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik pada masa mendatang. Dengan kondisi demikian kepala bidang harus segera melapor kepada kepala badan agar masalah ini dapat ditindak lanjuti.

Seksi tata penyuluhan dan bimbingan masyarakat

Adapun rincian tugas seksi tata penyuluhan dan bimbingan masyarakat adalah mengadakan penyuluhan kepada petani kebun, metode penyuluhan dan membuat

faktor penentu dan monitoring evaluasi kepada kelompok tani, memberikan pelayanan teknis, administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan, menetapkan metode, sistem kerja penyuluhan identifikasi faktor penentu pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan serta supervisi, mengadakan penyuluhan dan atau bersama penyuluh perkebunan kepada petani kebun, yang terakhir adalah menyusun program penyuluhan.

Seksi Bina Kelembagaan

Adapun rincian tugas seksi bina kelembagaan adalah sebagai berikut: (1) Memberikan bimbingan administrasi kepada kelompok tani perkebunan. (2) Melaksanakan penilaian kelas kelompok tani kebun. (3) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani kebun. (4) Memberikan pelayanan

teknis dan administrasi kebutuhan para petani kebun dan mitranya.

Seksi Bina Tenaga dan Prasarana

Seksi bina tenaga dan prasarana mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Membuat program penyuluhan dan kursus tani serta menyiapkan beberapa materi-materi penyuluhan. (2) Menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan dan mengelola sarana penyuluhan. (3) Memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan layanan teknis dan administrasi pada para penyuluh. (3) Membina dan mengembangkan kelembagaan tani, menyelenggarakan kursus-kursus tani dan menyiapkan materi-materi penyuluhan. (4) Mengembangkan dan membina kelembagaan tani kebun.

Adapun rincian Program-program Penyuluhan yang dibuat oleh bidang penyuluh Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir beserta kasinya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Program bidang penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir

No	Materi	Metode	Waktu
1.	Pembuatan tanaman dipekarangan (RPL)	Ceramah	february s/d Mei
2.	Meningkatkan produksi tanaman	Ceramah diskusi	Januari s/d Desember
3.	Percontohan pembuatan EM4 aktif	Ceramah dan demonstrasi cara	Mei
4.	Difersifikasi tanaman merica	Ceramah dan demonstrasi cara	Mei s/d Juli
5.	Memperbaiki mutu ojol dan kelapa sawit	Ceramah dan diskusi	Jan s/d Des
6.	Menyusun rencana kerja	Diskusi	Jan s/d Des
7.	Pemberantasan hama, bakteri dan pengendalian dengan teknik yang tepat pada tanaman karet	Gerakan bersama	September
8.	Meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya kehadiran dalam setiap pertemuan yang berhubungan dengan kegiatan usahatani	ceramah dan diskusi	Maret s/d Mei

Sumber: Program Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan 2015

Program dari bidang penyuluhan beserta seksi-seksinya yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat terdapat materi yang diberikan para penyuluh kepada para petani yang dituangkan dalam suatu program penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir.

Materi yang disusun dalam program oleh para penyuluh dinas perkebunan sudah sangat mendukung karena dalam program tersebut komoditi karet dan kelapa sawit, merupakan materi terbanyak yang akan di bahas. Hal ini dikarenakan luas lahan perkebunan diwilayah Kabupaten Rokan Hilir didominasi tanaman kelapa sawit dan karet, untuk komoditi karet pemerintah atau lembaga memberikan perhatian lebih hal ini dikarenakan semakin tahun luas tanaman karet semakin berkurang karena tergantikan oleh komoditi sawit.

Metode yang dipakai dalam penyampaian materi berupa ceramah, diskusi, demonstrasi cara, dan gerakan bersama selain dengan metode tersebut dinas perkebunan juga menggunakan berupa video-video singkat yang diputar pada saat kunjungan penyuluhan dilakukan. Kunjungan kerja yang dilakukan penyuluh dikantor dinas perkebunan sendiri dalam sebulan tidak menentu hal ini disesuaikan ada atau tidaknya masalah yang dihadapi, dalam satu bulan bisa mencapai 2-3 kali.

Kebijakan lain yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir adalah, Seksi yang ada dalam Bidang Penyuluhan ikut serta turun kelapangan untuk memberikan materi penyuluhan dan melihat langsung kondisi lapangan secara langsung. Selain memberi bimbingan

dan arahan bagi para penyuluh, keikutsertaan kepala bidang dan seksi-seksi Penyuluhan yang turun kelapangan dapat memberikan pengetahuan - pengetahuan baru bagi petani.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir beserta seksi-seksi yang ada, Program pada Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir tidak dibuat oleh Kepala Bidang Penyuluh dan seksinya melainkan dibuat oleh masing-masing penyuluh. Hal ini dirasa lebih efisien dan berdampak positif bagi petani karena setiap daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda beda, selain itu penyuluh juga berpendapat pembuatan program dengan cara demikian memudahkan dalam melakukannya dilapangan. Namun secara garis besar semua program yang dibuat sudah mengacu kepada informasi apa yang memang sedang dibutuhkan oleh para petani.

Kinerja Lembaga Penyuluhan Perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir

Menurut Widodo (2005) pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi pemerintah. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja

yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi (Mahsun dalam Budhiarsa, 2009).

Mahsun dalam Budhiarsa (2009), menjelaskan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dwiyanto (2006:47), menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai tolak ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai kinerja Dinas

Tabel 6. Rekapitulasi hasil penilaian penyuluh terhadap kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Penyuluh	Kategori
1	Responsivitas	2,22	Rendah
2	Responsibilitas	2,64	Cukup Tinggi
3	Akuntabilitas	2,25	Rendah
4	Kualitas Layanan	2,71	Cukup Tinggi
	Rata-rata	2,46	Cukup Tinggi

Berdasarkan analisis per indikator kinerja maka diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan (gabungan dari 4 indikator) menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir menurut persepsi penyuluh berada pada kategori cukup tinggi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan, karena dari

Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan persepsi penyuluh dan petani, yang dilihat berdasarkan indikator responsivitas, indikator responsibilitas, kemudian indikator akuntabilitas dan indikator kualitas layanan.

Presepsi Penyuluh Terhadap Kinerja Dinas Perkebunan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan empat indikator (responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan kualitas layanan) yang telah ditentukan diperoleh hasil kinerja dinas perkebunan dalam menangani kegiatan penyuluhan khususnya untuk petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

analisis per indikator dan per item (sub-indikator) kinerja menunjukkan hasil penilaian pada kategori sedang, hanya variabel responsivitas dan akuntabilitas yang berada pada kategori rendah yang artinya bahwa kemampuan Dinas Perkebunan sudah cukup dalam melaksanakan misi dan tujuannya, cukup dalam penentuan kebijakan yang berhubungan dengan petani kebun, cukup dalam melaksanakan program-program pembangunan perkebunan, dan

cukup dalam memberikan pelayanan kepada petani.

Kondisi yang ada dilapangan menggambarkan bahwasannya dalam memenuhi kebutuhan petani dalam berusaha tani dan pelayanan penyuluh kepada petani dirasa kurang salah satu penyebabnya adalah kurangnya tenaga penyuluh perkebunan yang tersedia. Tetapi penyuluh juga mengharapkan adanya perbaikan guna menunjang kinerja penyuluhan di Kabupaten Rokan Hilir, karena terlalu banyaknya

cakupan wilayah kerja penyuluh dirasa terlalu luas dan akan minimbilkan ketidak merataan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Presepsi Petani Terhadap Kinerja Dinas Perkebunan

Total hasil Penilain petani terhadap kinerja Dinas Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 7. Rekapitulasi hasil penilaian petani terhadap Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Petani	Kategori
1	Responsivitas	1,40	Sangat Rendah
2	Responsibilitas	1,61	Sangat Rendah
3	Akuntabilitas	1,43	Sangat Rendah
4	Kualitas Layanan	1,41	Sangat Rendah
	Rata-rata	1,46	Sangat Rendah

Penilaian petani terhadap Dinas Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan melayani patani mendapatkan skor 1,46 dengan kategori “sangat rendah”. Nilai ini menjelaskan bahwasannya peran lembaga penyuluhan dalam hal ini Dinas Perkebunan kurang memberikan kontribusinya kepada masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya petani yang tidak pernah merasakan bantuan dalam bentuk apapun dari lembaga baik berupa bantuan bibit, pupuk, pelatihan peningkatan kualitas SDM, kurang tanggapnya lembaga dalam menangani keluhan-keluhan dari petani, kurangnya penentuan kebijakan yang menguntungkan petani dalam hal penjualan hasil produksi dan pemerolehan sarana produksi, kurang meratanya program yang diberikan

lembaga, juga memicu kurang berperannya lembaga dimasyarakat ditambah lagi lembaga lebih menfokuskan kejenis tanaman perkebunan tertentu seperti tanaman karet.

Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh yang ada dilapangan juga menjadi penyebab kurang berperannya lembaga penyuluhan hal ini dikarenakan kurangnya kordinasi, yang menyebabkan lembaga akan mengalami kesulitan mengetahui apa saja permasalahan dari petani yang dihadapi dan kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan petani dalam melakukan kegiatan usahatannya, ditambah lagi petani menilai peran dari penyuluh kurang berperan karena dalam melaksanakan kegitan usahatannya petani lebih memilih mengandalkan pengalaman yang dimiliki bersama keluarga, informasi

dari masyarakat, teman dan sumber lainnya sehingga petani mampu mengolah usahatani miliknya sendiri dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri.

Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat mengevaluasi dirinya dan lebih memperhatikan serta meningkatkan kemampuan dan kinerjanya agar petani di wilayah kerjanya masing-masing dapat lebih meningkatkan tingkat adopsi inovasinya dan lebih sejahtera hidup petani di wilayah binaannya agar eksistensinya (keberadaan) yang dekat dengan masyarakat dapat dioptimalkan sesuai peran dan fungsinya.

Dengan demikian perlunya pengoptimalan kinerja yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi petani dengan peningkatan pelayanan yang penyuluhan lakukan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat tani yang disesuaikan kekhasan dan kondisi wilayah kerjanya dengan tidak mengabaikan prinsip - prinsip penyuluhan pertanian. Selain itu Perlu perhatian pemerintah kota mengenai keberadaan (eksistensi), peran dan fungsi strategis lembaga penyuluhan pertanian khususnya di Kecamatan dan peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan kualitas SDM petani dalam membangun sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan.

Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian yang ada, terutama dengan diklat dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja dan perkembangan dunia pertanian maupun perkebunan sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dan keterampilan teknis yang

sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan petani perkebunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pengamatan saya dilapangan maka saya mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bidang penyuluhan merupakan bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana bidang penyuluhan membawahi membawahi 8 orang penyuluh yang terbagi kedalam 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan penyuluh dibidang perkebunan hanyalah sebagai PPL yang bersifat struktural yang bertugas atas perintah dinas perkebunan. Latar belakang pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, dirasa kurang sesuai karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, kemudian untuk Peran, fungsi dan tugas pokok dari bidang penyuluhan beserta seksinya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan kebijakan yang diterapkan karena kurangnya tenaga penyuluh lapangan yang ada menyebabkan kurangnya koordinasi yang baik.
2. Berdasarkan persepsi penyuluh terhadap kinerja dinas perkebunan dalam menangani kegiatan penyuluhan masuk dalam kategori "cukup tinggi" hal ini terlihat dari empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini kualitas layanan dan responsibilitas masuk dalam kategori cukup tinggi

sedangkan responsivitas dan akuntabilitas masuk dalam kategori rendah.

3. Presepsi petani kelapa sawit dalam menilai kinerja dinas perkebunan selaku lembaga yang menangani kegiatan penyuluhan masuk dalam kategori sangat rendah, empat indikator yang digunakan semuanya berada pada kategori sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga dalam memenuhi kebutuhan petani kelapa sawit dalam berusahatani, pelayanan-pelayanan yang diberikan baik berupa bantuan dalam bentuk bibit ataupun pupuk belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal

Saran

1. Guna meningkatkan kinerja lembaga penyuluhan perkebunan perlu dilakukan penyesuaian latar belakang pendidikan yang dimiliki dengan pekerjaannya, program-program yang telah dibuat tidak hanya terfokus pada tanaman karet dan kelapa sawit dan lebih ditekankan program yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani perkebunan.
2. Pemberian bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan petani, penyusunan program-program yang sesuai dengan pembangunan wilayah setempat, yang tidak terfokus pada satu komoditi perkebunan, guna meningkatkan pelayanan kepada petani lembaga perlu menambah jumlah tenaga penyuluh,
3. Pemerintah daerah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan UU No. 16 tahun 2006 dengan membentuk kelembagaan khusus yang menangani kegiatan

penyuluhan, agar menciptakan suasana yang kondusif bagi penyuluh dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. **Rokan Hilir Dalam Angka 2015**.
- Budhiarsa Arif ,D, 2009. **Kinerja kantor pertanahan dalam pelayanan sertifikasi tanah** (studi deskriptif atas pelayanan sertifikasi peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan Kota Surakarta 2008-2009).Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Dwiyanto Agus, dkk, 2006. **Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia**. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Mahmudi, 2007. **Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN**.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015. **Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019**.
- Ridwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2011. **Cara menggunakan dan memakai path Sanalysis (Analisis Jalur). Edidi Revisi**, Cetakan Ketiga. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D**. Bandung : Alfabeta.
- Widodo Joko, 2008. **Birokrasi Berbasis Kinerja**. Malang : Banyu Media Publishing.